Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Bupati Sampaikan Persetujuan Terhadap Raperda Perubahan Kedua Atas Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kamis, 16 September 2021

Dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Bupati Irsyad Yusuf menyetujui Raperda non APBD tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Persetujuan ini didasarkan pada pembahasan dan persetujuan bersama antara kelompok kerja eksekutif dan Pansus Legislatif, serta tanggapan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur. Proses ini telah melalui konsultasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai amanat Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Bupati Irsyad, didampingi Wakil Bupati Mujib Imron, menjelaskan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasuruan mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan ini mencakup Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang menjadi Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya berganti nama menjadi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Tahap selanjutnya dari Raperda tersebut adalah penyerahan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan Nomor Register Perda. Setelah itu, Raperda akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan-Perundang-undangan dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah. Bupati Irsyad berharap kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini dapat terus ditingkatkan agar dapat menjalankan peran dan kewenangan masing-masing secara optimal.

Perubahan nomenklatur pada OPD di Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Harapannya, perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.